



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.492, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Hak Atas
Tanah. Bangunan. Bea Perolehan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 214/PMK.07/2009

TENTANG

**ALOKASI DEFINITIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN
KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang

Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DEFINITIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

- (1) Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) bagian Daerah.
- (2) Alokasi BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

Pasal 2

- (1) Alokasi Definitif BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 merupakan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009.
- (2) Alokasi definitif BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.192.979.709.998,00 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (3) Alokasi Definitif BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran alokasi BPHTB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I pada bulan April, tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran alokasi BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota tahap III didasarkan pada selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan II.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN R.I.
 NOMOR : 214/PMK.07/2009 TENTANG
 ALOKASI DEFINITIF BEA PEROLEHAN
 HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
 BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG
 DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN
 DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009

**PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS
 TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
 YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2009**

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	BPHTB
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	
1	Kab. Aceh Barat	2.475.061.639
2	Kab. Aceh Besar	2.475.061.639
3	Kab. Aceh Selatan	2.475.061.639
4	Kab. Aceh Singkil	2.475.061.639
5	Kab. Aceh Tengah	2.475.061.639
6	Kab. Aceh Tenggara	2.475.061.639
7	Kab. Aceh Timur	2.475.061.639
8	Kab. Aceh Utara	2.475.061.639
9	Kab. Bireuen	2.475.061.639
10	Kab. Aceh Pidie	2.475.061.639
11	Kab. Simeulue	2.475.061.639
12	Kota Banda Aceh	2.475.061.639
13	Kota Sabang	2.475.061.639
14	Kota Langsa	2.475.061.639
15	Kota Lhokseumawe	2.475.061.639
16	Kab. Nagan Raya	2.475.061.639
17	Kab. Aceh Jaya	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
18	Kab. Aceh Barat Daya	2.475.061.639
19	Kab. Gayo Lues	2.475.061.639
20	Kab. Aceh Tamiang	2.475.061.639
21	Kab. Bener Meriah	2.475.061.639
22	Kab. Pidie Jaya	2.475.061.639
23	Kota Subulussalam	2.475.061.639
II	Provinsi Sumatera Utara	
1	Kab. Asahan	2.475.061.639
2	Kab. Dairi	2.475.061.639
3	Kab. Deli Serdang	2.475.061.639
4	Kab. Karo	2.475.061.639
5	Kab. Labuhan Batu	2.475.061.639
6	Kab. Langkat	2.475.061.639
7	Kab. Mandailing Natal	2.475.061.639
8	Kab. Nias	2.475.061.639
9	Kab. Simalungun	2.475.061.639
10	Kab. Tapanuli Selatan	2.475.061.639
11	Kab. Tapanuli Tengah	2.475.061.639
12	Kab. Tapanuli Utara	2.475.061.639
13	Kab. Toba Samosir	2.475.061.639
14	Kota Binjai	2.475.061.639
15	Kota Medan	2.475.061.639
16	Kota Pematang Siantar	2.475.061.639
17	Kota Sibolga	2.475.061.639
18	Kota Tanjung Balai	2.475.061.639
19	Kota Tebing Tinggi	2.475.061.639
20	Kota Padang Sidempuan	2.475.061.639
21	Kab. Pakpak Bharat	2.475.061.639
22	Kab. Nias Selatan	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
23	Kab. Humbang Hasundutan	2.475.061.639
24	Kab. Serdang Bedagai	2.475.061.639
25	Kab. Samosir	2.475.061.639
26	Kab. Batu Bara	2.475.061.639
27	Kab. Padang Lawas Utara	2.475.061.639
28	Kab. Padang Lawas	2.475.061.639
29	Kab. Labuhan Batu Selatan	2.475.061.639
30	Kab. Labuhan Batu Utara	2.475.061.639
III	Provinsi Sumatera Barat	
1	Kab. Limapuluh Kota	2.475.061.639
2	Kab. Agam	2.475.061.639
3	Kab. Kepulauan Mentawai	2.475.061.639
4	Kab. Padang Pariaman	2.475.061.639
5	Kab. Pasaman	2.475.061.639
6	Kab. Pesisir Selatan	2.475.061.639
7	Kab. Sijunjung	2.475.061.639
8	Kab. Solok	2.475.061.639
9	Kab. Tanah Datar	2.475.061.639
10	Kota Bukit Tinggi	2.475.061.639
11	Kota Padang Panjang	2.475.061.639
12	Kota Padang	2.475.061.639
13	Kota Payakumbuh	2.475.061.639
14	Kota Sawahlunto	2.475.061.639
15	Kota Solok	2.475.061.639
16	Kota Pariaman	2.475.061.639
17	Kab. Pasaman Barat	2.475.061.639
18	Kab. Dharmasraya	2.475.061.639
19	Kab. Solok Selatan	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
IV	Provinsi Riau	
1	Kab. Bengkalis	2.475.061.639
2	Kab. Indragiri Hilir	2.475.061.639
3	Kab. Indragiri Hulu	2.475.061.639
4	Kab. Kampar	2.475.061.639
5	Kab. Kuantan Singingi	2.475.061.639
6	Kab. Pelalawan	2.475.061.639
7	Kab. Rokan Hilir	2.475.061.639
8	Kab. Rokan Hulu	2.475.061.639
9	Kab. Siak	2.475.061.639
10	Kota Dumai	2.475.061.639
11	Kota Pekanbaru	2.475.061.639
V	Provinsi Kepulauan Riau	
1	Kab. Bintan	2.475.061.639
2	Kab. Natuna	2.475.061.639
3	Kab. Karimun	2.475.061.639
4	Kota Batam	2.475.061.639
5	Kota Tanjung Pinang	2.475.061.639
6	Kab. Lingga	2.475.061.639
7	Kab. Kepulauan Anambas	2.475.061.639
VI	Provinsi Jambi	
1	Kab. Batanghari	2.475.061.639
2	Kab. Bungo	2.475.061.639
3	Kab. Kerinci	2.475.061.639
4	Kab. Merangin	2.475.061.639
5	Kab. Muaro Jambi	2.475.061.639
6	Kab. Sarolangun	2.475.061.639
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	2.475.061.639
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.475.061.639
9	Kab. Tebo	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
10	Kota Jambi	2.475.061.639
11	Kota Sungai Penuh	2.475.061.639
VII	Provinsi Sumatera Selatan	
1	Kab. Lahat	2.475.061.639
2	Kab. Musi Banyuasin	2.475.061.639
3	Kab. Musi Rawas	2.475.061.639
4	Kab. Muara Enim	2.475.061.639
5	Kab. Ogan Komering Ilir	2.475.061.639
6	Kab. Ogan Komering Ulu	2.475.061.639
7	Kota Palembang	2.475.061.639
8	Kota Pagar Alam	2.475.061.639
9	Kota Lubuk Linggau	2.475.061.639
10	Kota Prabumulih	2.475.061.639
11	Kab. Banyuasin	2.475.061.639
12	Kab. Ogan Ilir	2.475.061.639
13	Kab. OKU Timur	2.475.061.639
14	Kab. OKU Selatan	2.475.061.639
15	Kab. Empat Lawang	2.475.061.639
VIII	Provinsi Bangka Belitung	
1	Kab. Bangka	2.475.061.639
2	Kab. Belitung	2.475.061.639
3	Kota Pangkal Pinang	2.475.061.639
4	Kab. Bangka Selatan	2.475.061.639
5	Kab. Bangka Tengah	2.475.061.639
6	Kab. Bangka Barat	2.475.061.639
7	Kab. Belitung Timur	2.475.061.639
IX	Provinsi Bengkulu	
1	Kab. Bengkulu Selatan	2.475.061.639
2	Kab. Bengkulu Utara	2.475.061.639
3	Kab. Rejang Lebong	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
4	Kota Bengkulu	2.475.061.639
5	Kab. Kaur	2.475.061.639
6	Kab. Seluma	2.475.061.639
7	Kab. Mukomuko	2.475.061.639
8	Kab. Lebong	2.475.061.639
9	Kab. Kepahiang	2.475.061.639
10	Kab. Bengkulu Tengah	2.475.061.639
X	Provinsi Lampung	
1	Kab. Lampung Barat	2.475.061.639
2	Kab. Lampung Selatan	2.475.061.639
3	Kab. Lampung Tengah	2.475.061.639
4	Kab. Lampung Utara	2.475.061.639
5	Kab. Lampung Timur	2.475.061.639
6	Kab. Tanggamus	2.475.061.639
7	Kab. Tulang Bawang	2.475.061.639
8	Kab. Way Kanan	2.475.061.639
9	Kota Bandar Lampung	2.475.061.639
10	Kota Metro	2.475.061.639
11	Kab. Pesawaran	2.475.061.639
XI	Provinsi DKI Jakarta	12.375.308.195
XII	Provinsi Jawa Barat	
1	Kab. Bandung	2.475.061.639
2	Kab. Bekasi	2.475.061.639
3	Kab. Bogor	2.475.061.639
4	Kab. Ciamis	2.475.061.639
5	Kab. Cianjur	2.475.061.639
6	Kab. Cirebon	2.475.061.639
7	Kab. Garut	2.475.061.639
8	Kab. Indramayu	2.475.061.639
9	Kab. Karawang	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
10	Kab. Kuningan	2.475.061.639
11	Kab. Majalengka	2.475.061.639
12	Kab. Purwakarta	2.475.061.639
13	Kab. Subang	2.475.061.639
14	Kab. Sukabumi	2.475.061.639
15	Kab. Sumedang	2.475.061.639
16	Kab. Tasikmalaya	2.475.061.639
17	Kota Bandung	2.475.061.639
18	Kota Bekasi	2.475.061.639
19	Kota Bogor	2.475.061.639
20	Kota Cirebon	2.475.061.639
21	Kota Depok	2.475.061.639
22	Kota Sukabumi	2.475.061.639
23	Kota Cimahi	2.475.061.639
24	Kota Tasikmalaya	2.475.061.639
25	Kota Banjar	2.475.061.639
26	Kab. Bandung Barat	2.475.061.639
XIII	Provinsi Banten	
1	Kab. Lebak	2.475.061.639
2	Kab. Pandeglang	2.475.061.639
3	Kab. Serang	2.475.061.639
4	Kab. Tangerang	2.475.061.639
5	Kota Cilegon	2.475.061.639
6	Kota Tangerang	2.475.061.639
7	Kota Serang	2.475.061.639
XIV	Provinsi Jawa Tengah	
1	Kab. Banjarnegara	2.475.061.639
2	Kab. Banyumas	2.475.061.639
3	Kab. Batang	2.475.061.639
4	Kab. Blora	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
5	Kab. Boyolali	2.475.061.639
6	Kab. Brebes	2.475.061.639
7	Kab. Cilacap	2.475.061.639
8	Kab. Demak	2.475.061.639
9	Kab. Grobogan	2.475.061.639
10	Kab. Jepara	2.475.061.639
11	Kab. Karanganyar	2.475.061.639
12	Kab. Kebumen	2.475.061.639
13	Kab. Kendal	2.475.061.639
14	Kab. Klaten	2.475.061.639
15	Kab. Kudus	2.475.061.639
16	Kab. Magelang	2.475.061.639
17	Kab. Pati	2.475.061.639
18	Kab. Pekalongan	2.475.061.639
19	Kab. Pemalang	2.475.061.639
20	Kab. Purbalingga	2.475.061.639
21	Kab. Purworejo	2.475.061.639
22	Kab. Rembang	2.475.061.639
23	Kab. Semarang	2.475.061.639
24	Kab. Sragen	2.475.061.639
25	Kab. Sukoharjo	2.475.061.639
26	Kab. Tegal	2.475.061.639
27	Kab. Temanggung	2.475.061.639
28	Kab. Wonogiri	2.475.061.639
29	Kab. Wonosobo	2.475.061.639
30	Kota Magelang	2.475.061.639
31	Kota Pekalongan	2.475.061.639
32	Kota Salatiga	2.475.061.639
33	Kota Semarang	2.475.061.639
34	Kota Surakarta	2.475.061.639
35	Kota Tegal	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
XV	Provinsi DI Yogyakarta	
1	Kab. Bantul	2.475.061.639
2	Kab. Gunung Kidul	2.475.061.639
3	Kab. Kulon Progo	2.475.061.639
4	Kab. Sleman	2.475.061.639
5	Kota Yogyakarta	2.475.061.639
XVI	Provinsi Jawa Timur	
1	Kab. Bangkalan	2.475.061.639
2	Kab. Banyuwangi	2.475.061.639
3	Kab. Blitar	2.475.061.639
4	Kab. Bojonegoro	2.475.061.639
5	Kab. Bondowoso	2.475.061.639
6	Kab. Gresik	2.475.061.639
7	Kab. Jember	2.475.061.639
8	Kab. Jombang	2.475.061.639
9	Kab. Kediri	2.475.061.639
10	Kab. Lamongan	2.475.061.639
11	Kab. Lumajang	2.475.061.639
12	Kab. Madiun	2.475.061.639
13	Kab. Magetan	2.475.061.639
14	Kab. Malang	2.475.061.639
15	Kab. Mojokerto	2.475.061.639
16	Kab. Nganjuk	2.475.061.639
17	Kab. Ngawi	2.475.061.639
18	Kab. Pacitan	2.475.061.639
19	Kab. Pamekasan	2.475.061.639
20	Kab. Pasuruan	2.475.061.639
21	Kab. Ponorogo	2.475.061.639
22	Kab. Probolinggo	2.475.061.639
23	Kab. Sampang	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
24	Kab. Sidoarjo	2.475.061.639
25	Kab. Situbondo	2.475.061.639
26	Kab. Sumenep	2.475.061.639
27	Kab. Trenggalek	2.475.061.639
28	Kab. Tuban	2.475.061.639
29	Kab. Tulungagung	2.475.061.639
30	Kota Blitar	2.475.061.639
31	Kota Kediri	2.475.061.639
32	Kota Madiun	2.475.061.639
33	Kota Malang	2.475.061.639
34	Kota Mojokerto	2.475.061.639
35	Kota Pasuruan	2.475.061.639
36	Kota Probolinggo	2.475.061.639
37	Kota Surabaya	2.475.061.639
38	Kota Batu	2.475.061.639
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	
1	Kab. Bengkayang	2.475.061.639
2	Kab. Landak	2.475.061.639
3	Kab. Kapuas Hulu	2.475.061.639
4	Kab. Ketapang	2.475.061.639
5	Kab. Pontianak	2.475.061.639
6	Kab. Sambas	2.475.061.639
7	Kab. Sanggau	2.475.061.639
8	Kab. Sintang	2.475.061.639
9	Kota Pontianak	2.475.061.639
10	Kota Singkawang	2.475.061.639
11	Kab. Sekadau	2.475.061.639
12	Kab. Melawi	2.475.061.639
13	Kab. Kayong Utara	2.475.061.639
14	Kab. Kubu Raya	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	
1	Kab. Barito Selatan	2.475.061.639
2	Kab. Barito Utara	2.475.061.639
3	Kab. Kapuas	2.475.061.639
4	Kab. Kotawaringin Barat	2.475.061.639
5	Kab. Kotawaringin Timur	2.475.061.639
6	Kota Palangkaraya	2.475.061.639
7	Kab. Barito Timur	2.475.061.639
8	Kab. Murung Raya	2.475.061.639
9	Kab. Pulang Pisau	2.475.061.639
10	Kab. Gunung Mas	2.475.061.639
11	Kab. Lamandau	2.475.061.639
12	Kab. Sukamara	2.475.061.639
13	Kab. Katingan	2.475.061.639
14	Kab. Seruyan	2.475.061.639
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	
1	Kab. Banjar	2.475.061.639
2	Kab. Barito Kuala	2.475.061.639
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	2.475.061.639
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.475.061.639
5	Kab. Hulu Sungai Utara	2.475.061.639
6	Kab. Kota Baru	2.475.061.639
7	Kab. Tabalong	2.475.061.639
8	Kab. Tanah Laut	2.475.061.639
9	Kab. Tapin	2.475.061.639
10	Kota Banjar Baru	2.475.061.639
11	Kota Banjarmasin	2.475.061.639
12	Kab. Balangan	2.475.061.639
13	Kab. Tanah Bumbu	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
XX	Provinsi Kalimantan Timur	
1	Kab. Berau	2.475.061.639
2	Kab. Bulungan	2.475.061.639
3	Kab. Kutai Kartanegara	2.475.061.639
4	Kab. Kutai Barat	2.475.061.639
5	Kab. Kutai Timur	2.475.061.639
6	Kab. Malinau	2.475.061.639
7	Kab. Nunukan	2.475.061.639
8	Kab. Paser	2.475.061.639
9	Kota Balikpapan	2.475.061.639
10	Kota Bontang	2.475.061.639
11	Kota Samarinda	2.475.061.639
12	Kota Tarakan	2.475.061.639
13	Kab. Penajam Paser Utara	2.475.061.639
14	Kab. Tana Tidung	2.475.061.639
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	
1	Kab. Bolaang Mongondow	2.475.061.639
2	Kab. Minahasa	2.475.061.639
3	Kab. Sangihe	2.475.061.639
4	Kota Bitung	2.475.061.639
5	Kota Manado	2.475.061.639
6	Kab. Kepulauan Talaud	2.475.061.639
7	Kab. Minahasa Selatan	2.475.061.639
8	Kota Tomohon	2.475.061.639
9	Kab. Minahasa Utara	2.475.061.639
10	Kota Kotamobagu	2.475.061.639
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.475.061.639
12	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2.475.061.639
13	Kab. Minahasa Tenggara	2.475.061.639
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2.475.061.639
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
XXII	Provinsi Gorontalo	
1	Kab. Boalemo	2.475.061.639
2	Kab. Gorontalo	2.475.061.639
3	Kota Gorontalo	2.475.061.639
4	Kab. Pohuwato	2.475.061.639
5	Kab. Bone Bolango	2.475.061.639
6	Kab. Gorontalo Utara	2.475.061.639
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	
1	Kab. Banggai	2.475.061.639
2	Kab. Banggai Kepulauan	2.475.061.639
3	Kab. Buol	2.475.061.639
4	Kab. Toli-Toli	2.475.061.639
5	Kab. Donggala	2.475.061.639
6	Kab. Morowali	2.475.061.639
7	Kab. Poso	2.475.061.639
8	Kota Palu	2.475.061.639
9	Kab. Parigi Moutong	2.475.061.639
10	Kab. Tojo Una Una	2.475.061.639
11	Kab. Sigi	2.475.061.639
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	
1	Kab. Bantaeng	2.475.061.639
2	Kab. Barru	2.475.061.639
3	Kab. Bone	2.475.061.639
4	Kab. Bulukumba	2.475.061.639
5	Kab. Enrekang	2.475.061.639
6	Kab. G o w a	2.475.061.639
7	Kab. Jeneponto	2.475.061.639
8	Kab. Luwu	2.475.061.639
9	Kab. Luwu Utara	2.475.061.639
10	Kab. M a r o s	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	2.475.061.639
12	Kab. Pinrang	2.475.061.639
13	Kab. Selayar	2.475.061.639
14	Kab. Sidenreng Rappang	2.475.061.639
15	Kab. Sinjai	2.475.061.639
16	Kab. Soppeng	2.475.061.639
17	Kab. Takalar	2.475.061.639
18	Kab. Tana Toraja	2.475.061.639
19	Kab. Wajo	2.475.061.639
20	Kota Pare-pare	2.475.061.639
21	Kota Makassar	2.475.061.639
22	Kota Palopo	2.475.061.639
23	Kab. Luwu Timur	2.475.061.639
24	Kab. Toraja Utara	2.475.061.639
XXV	Provinsi Sulawesi Barat	
1	Kab. Majene	2.475.061.639
2	Kab. Mamuju	2.475.061.639
3	Kab. Polewali Mandar	2.475.061.639
4	Kab. Mamasa	2.475.061.639
5	Kab. Mamuju Utara	2.475.061.639
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	
1	Kab. Buton	2.475.061.639
2	Kab. Konawe	2.475.061.639
3	Kab. Kolaka	2.475.061.639
4	Kab. Muna	2.475.061.639
5	Kota Kendari	2.475.061.639
6	Kota Bau-bau	2.475.061.639
7	Kab. Konawe Selatan	2.475.061.639
8	Kab. Bombana	2.475.061.639
9	Kab. Wakatobi	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
10	Kab. Kolaka Utara	2.475.061.639
11	Kab. Konawe Utara	2.475.061.639
12	Kab. Buton Utara	2.475.061.639
XXVII	Provinsi Bali	
1	Kab. Badung	2.475.061.639
2	Kab. Bangli	2.475.061.639
3	Kab. Buleleng	2.475.061.639
4	Kab. Gianyar	2.475.061.639
5	Kab. Jembrana	2.475.061.639
6	Kab. Karangasem	2.475.061.639
7	Kab. Klungkung	2.475.061.639
8	Kab. Tabanan	2.475.061.639
9	Kota Denpasar	2.475.061.639
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
1	Kab. Bima	2.475.061.639
2	Kab. Dompu	2.475.061.639
3	Kab. Lombok Barat	2.475.061.639
4	Kab. Lombok Tengah	2.475.061.639
5	Kab. Lombok Timur	2.475.061.639
6	Kab. Sumbawa	2.475.061.639
7	Kota Mataram	2.475.061.639
8	Kota Bima	2.475.061.639
9	Kab. Sumbawa Barat	2.475.061.639
10	Kab. Lombok Utara	2.475.061.639
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
1	Kab. Alor	2.475.061.639
2	Kab. Belu	2.475.061.639
3	Kab. Ende	2.475.061.639
4	Kab. Flores Timur	2.475.061.639
5	Kab. Kupang	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
6	Kab. Lembata	2.475.061.639
7	Kab. Manggarai	2.475.061.639
8	Kab. Ngada	2.475.061.639
9	Kab. Sikka	2.475.061.639
10	Kab. Sumba Barat	2.475.061.639
11	Kab. Sumba Timur	2.475.061.639
12	Kab. Timor Tengah Selatan	2.475.061.639
13	Kab. Timor Tengah Utara	2.475.061.639
14	Kota Kupang	2.475.061.639
15	Kab. Rote Ndao	2.475.061.639
16	Kab. Manggarai Barat	2.475.061.639
17	Kab. Nagekeo	2.475.061.639
18	Kab. Sumba Barat Daya	2.475.061.639
19	Kab. Sumba Tengah	2.475.061.639
20	Kab. Manggarai Timur	2.475.061.639
XXX	Provinsi Maluku	
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	2.475.061.639
2	Kab. Maluku Tengah	2.475.061.639
3	Kab. Maluku Tenggara	2.475.061.639
4	Kab. Pulau Buru	2.475.061.639
5	Kota Ambon	2.475.061.639
6	Kab. Seram Bagian Barat	2.475.061.639
7	Kab. Seram Bagian Timur	2.475.061.639
8	Kab. Kepulauan Aru	2.475.061.639
9	Kota Tual	2.475.061.639
10	Kab. Maluku Barat Daya	2.475.061.639
11	Kab. Buru Selatan	2.475.061.639
XXXI	Provinsi Maluku Utara	
1	Kab. Halmahera Tengah	2.475.061.639
2	Kab. Halmahera Barat	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
3	Kota Ternate	2.475.061.639
4	Kab. Halmahera Timur	2.475.061.639
5	Kota Tidore Kepulauan	2.475.061.639
6	Kab. Kepulauan Sula	2.475.061.639
7	Kab. Halmahera Selatan	2.475.061.639
8	Kab. Halmahera Utara	2.475.061.639
XXXII	Provinsi Papua	
1	Kab. Biak Numfor	2.475.061.639
2	Kab. Jayapura	2.475.061.639
3	Kab. Jayawijaya	2.475.061.639
4	Kab. Merauke	2.475.061.639
5	Kab. Mimika	2.475.061.639
6	Kab. Nabire	2.475.061.639
7	Kab. Paniai	2.475.061.639
8	Kab. Puncak Jaya	2.475.061.639
9	Kab. Kepulauan Yapen	2.475.061.639
10	Kota Jayapura	2.475.061.639
11	Kab. Sarmi	2.475.061.639
12	Kab. Keerom	2.475.061.639
13	Kab. Yahukimo	2.475.061.639
14	Kab. Pegunungan Bintang	2.475.061.639
15	Kab. Tolikara	2.475.061.639
16	Kab. Boven Digoel	2.475.061.639
17	Kab. Mappi	2.475.061.639
18	Kab. Asmat	2.475.061.639
19	Kab. Waropen	2.475.061.639
20	Kab. Supiori	2.475.061.639
21	Kab. Mamberamo Raya	2.475.061.639
22	Kab. Mamberamo Tengah	2.475.061.639
23	Kab. Yalimo	2.475.061.639
24	Kab. Lanny Jaya	2.475.061.639

NO	DAERAH	BPHTB
25	Kab. Nduga	2.475.061.639
26	Kab. Puncak	2.475.061.639
27	Kab. Dogiyai	2.475.061.639
XXXIII	Provinsi Papua Barat	
1	Kab. Sorong	2.475.061.639
2	Kab. Manokwari	2.475.061.639
3	Kab. Fak Fak	2.475.061.639
4	Kota Sorong	2.475.061.639
5	Kab. Sorong Selatan	2.475.061.639
6	Kab. Raja Ampat	2.475.061.639
7	Kab. Teluk Bintuni	2.475.061.639
8	Kab. Teluk Wondama	2.475.061.639
9	Kab. Kaimana	2.475.061.639
	Total	1.192.979.709.998

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SRI MULYANI INDRAWATI